

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DENGAN KINERJA KEUANGAN SEBAGAI PEMODERASI PADA PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

Darza Nuhhirto

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pasir Pengaraian

Email: darzanuhhirto98@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of local revenue, balancing funds and capital expenditures on regional economic growth with financial performance as a moderator in the government of Rokan Hulu Regency. The research method used is quantitative method. The data used are secondary data obtained from reports on the realization of the Rokan Hulu district government budget and Gross Regional Domestic Product (GRDP) at constant prices. The dependent variable of this study is regional economic growth (Y) and the independent variable is local revenue (X1), balancing funds (X2), and capital expenditures (X3) as well as financial performance (Z) as moderating variables. The method used is the classical assumption test, multiple linear regression and MRA.

The results of this study indicate that local revenue, balancing funds and capital expenditures have no partial and simultaneous effect on economic growth. Meanwhile, financial performance also cannot moderate the relationship between the independent variable and the dependent variable.

Keywords: *Local revenue, balancing funds, capital expenditures, economic growth and financial performance*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan kinerja keuangan sebagai pemoderasi pada pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Metode penelitian yang digunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten Rokan Hulu dan Produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Variabel dependen penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi daerah (Y) dan variabel independen adalah pendapatan asli daerah (X1), dana perimbangan (X2), dan belanja modal (X3) serta kinerja keuangan (Z) sebagai variabel moderasi. Metode yang digunakan adalah dengan uji asumsi klasik, regresi linier berganda dan MRA.

Hasil penelitian ini menunjukkan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal tidak berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kinerja keuangan juga tidak dapat memoderasi hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Kata kunci : *Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan kinerja keuangan*

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Kabupaten Rokan Hulu, dengan Ibu kota Pasir Pengaraian, terletak dalam wilayah Provinsi Riau dan terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar. Secara juridis formal, Kabupaten Rokan Hulu terbentuk sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. Pada waktu berikutnya, Undang-undang dimaksud disempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003.

Berdasarkan undang-undang republik indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat

dan pemerintahan daerah. Maka pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya mempunyai wewenang untuk menentukan arah pembangunan di daerahnya masing-masing.

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu nomor 1 tahun 2016 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah pada pasal pasal 21 ayat 1. Pendapatan asli daerah berdasarkan perda nomor 1 tahun 2016 adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber penerimaan daerah selain PAD adalah dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan hasil penelitian, mulai dari pengaruh belanja pemerintah secara keseluruhan hingga spesifik kepada belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan kinerja keuangan sebagai pemoderasi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi daerah?
2. Apakah dana perimbangan berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi daerah?
3. Apakah belanja modal berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi daerah?
4. Apakah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan kinerja keuangan sebagai pemoderasi?
5. Apakah kinerja keuangan dapat memoderasi pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi?

6. Apakah kinerja keuangan dapat memoderasi dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi?
7. Apakah kinerja keuangan dapat memoderasi belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu?

2. Kajian Pustaka

Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya.

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2019 menyatakan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan daerah.

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan diartikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja (Performance) dapat diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan.

Hipotesis Hipotesis

Hipotesis pada penelitian adalah:

1. H1 : Diduga Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
2. H2 : Diduga dana perimbangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
3. H3 : Diduga belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

daerah.

4. H4 : Diduga pendapatan asli daerah, Dana Perimbangan dan Belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
5. H5 : Diduga kinerja keuangan dapat memoderasi hubungan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.
6. H6 : Diduga kinerja keuangan dapat memoderasi hubungan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi.
7. H7 : Diduga kinerja keuangan dapat memoderasi hubungan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Metode Penelitian Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah kabupatena Rokan Hulu berupa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Rokan Hulu dari BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah) dan pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten Rokan Hulu dari (www.bps.go.id).

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif, dimana tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan hipotesis, menggunakan instrumen penelitian. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat (Positivisme) , digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan (Sugiyono, 2019).

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten Rokan Hulu berdasarkan harga konstan dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atau laporan perubahan saldo anggaran lebih (LP-SAL) Kabupaten Rokan Hulu. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten Rokan Hulu dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rokan Hulu.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode pengumpulan data dokumentasi dilakukan dengan menggunakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Rokan Hulu dan data publikasi pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten Rokan Hulu untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk melengkapi penelitian ini. Data yang diperlukan diperoleh dari BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah) dan pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten Rokan Hulu dari (www.bps.go.id)

4. Hasil dan Pembahasan

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk melakukan prediksi seberapa tinggi nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dimanipulasi (diubah-ubah). Sesuai dengan hasil pengolahan data penelitian dengan bantuan aplikasi E-Views versi 10 maka berikut ini penulis sajikan hasilnya sebagai berikut: $Y = -0.381789 + 0.982792 + 0.416306 + 1.809522$

Uji koefisien determinasi (R²)

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan nilai *R square* sebesar 0,384832. Hal ini menunjukkan bahwa variabilitas variabel dependen hanya dapat menjelaskan variabel independen adalah sebesar

38.4 % dan sisanya yaitu 61.1% dijelaskan oleh variabilitas variabel-variabel lain di luar model penelitian.

Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan hasil pengujian *hosmer and lemeshow*, dengan probabilitas signifikansi menunjukkan angka 0,836617 Nilai signifikansi dengan probabilitas lebih besar dari 0,05 ($0,836617 > 0,05$) sehingga H_0 ditolak. Hal ini berarti bahwa model regresi tidak mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model ditolak karena tidak cocok dengan data observasinya.

Uji Parsial (Uji t)

Nilai signifikansi α 0.2259 $>$ 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen pendapatan asli daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau hipotesis ditolak. Nilai signifikansi α 0.5097 $>$ 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen dana perimbangan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau hipotesis ditolak. Nilai signifikansi α 0.5730 $>$ 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen belanja modal secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau hipotesis ditolak.

Uji Moderasi

Hasil uji residual MRA 1 menunjukkan nilai koefisien negatif, yaitu 5.544395 dan nilai signifikan M1 0.1543 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ yang berarti bahwa kinerja keuangan merupakan variabel yang tidak memoderasi hubungan antara pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil uji residual MRA 2 menunjukkan nilai koefisien negatif, yaitu -7.386547 dan nilai signifikan M1 0.8865 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ yang berarti bahwa kinerja keuangan merupakan variabel yang tidak memoderasi hubungan antara dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil uji residual MRA 3 menunjukkan nilai koefisien negatif, yaitu -17.07248 dan nilai signifikan M1 0.4457 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ yang berarti bahwa kinerja keuangan merupakan variabel yang tidak memoderasi hubungan antara dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi.

5. Penutup Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Pemoderasi Pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.” dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil uji f dengan koefisien determinasi sebesar 38.4 % diperoleh hasil bahwa tingkat signifikansi $>$ 0,05 ($0.582372 > 0,05$) hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal tidak memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Hasil uji t untuk pendapatan asli daerah dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah diperoleh hasil bahwa tingkat signifikansi $>$ 0,05 ($0.2259 > 0,05$), dana perimbangan dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah diperoleh hasil bahwa tingkat signifikansi $>$ 0,05 ($0.5097 > 0,05$), dan belanja modal dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah diperoleh

hasil bahwa tingkat signifikansi $> 0,05$ ($0.5730 > 0,05$).

3. Hasil uji MRA (Moderating Regresion Analisis) diperoleh hasil bahwa tingkat signifikansi MRA 1, MRA 2 dan MRA 3 $> 0,05$ ($0.1543, 0.8865$ dan $0.4457 > 0,05$) hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan tidak memoderasi hubungan variabel independen pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap variabel dependen pertumbuhan ekonomi daerah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang penulis berikan kepada pihak - pihak terkait dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi instansi mempertimbangkan program- program dalam sektor peningkatan lapangan usaha.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain seperti angka ketergantungan, investasi dan tenaga kerja.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan menganalisis kinerja keuangan dengan rasio kemandirian, efektivitas dan efisiensi.

Daftar Pustaka

- Afriyeni, A. 2017. *Profitabilitas Bank Perkreditan Rakyat Di Kota Padang di Tinjau Dari Rasio Likuiditas. Jurnal Benefita.*
- Ani, N.L.N.P. and Dwirandra, A.A.N.B., 2014. *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota.* E-Jurnal Akuntansi, 6(3), pp.481-497.
- Astuti, N.D., 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2014.* Universitas Negeri Yogyakarta.
- Azhar, M.K.S., 2010. *Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum dan setelah otonomi daerah.* Jurnal Keuangan & Bisnis Program Studi Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan, 2(1), pp.57-70.
- Bayu, w., 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan* (Doctoral Dissertation, Politeknik Negeri Sriwijaya).
- Dewi., 2018. *Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota di provinsi sumatera utara.* Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Heryanti, C.D., 2019. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur* (Doctoral dissertation, STIESIA SURABAYA).
- Muda, M., 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perrimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan dengan Belanja Modal sebagai Variabel Moderating.*

- Manek, M. and Badrudin, R., 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur*. *Telaah Bisnis*, 17(2), pp.81-98.
- Rahmayati, A., 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011- 2013*. *Eka Cida*, 1(1).
- Saraswati, D., 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai Pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara*. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), pp.54-68.
- Saraswati, I.A. and Ramantha, I.W., 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal dan Investasi Swasta sebagai Pemoderasi*. *E-Jurnal Akuntansi*, 24(1), pp.662-686.
- Sari, G.N., Kindangen, P. and Rotinsulu, T.O., 2019. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan di Sulawesi Utara Tahun 2004–2014*. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 18(2).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang. *Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi Dan Kota Batam*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang. *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2018 Tentang. *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*
- UU Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang. *Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2009 Tentang. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2009 Tentang. *Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2010*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Pasal 53 Ayat (1) Tentang. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang. *Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah*
- Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2018 Tentang. *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019*